

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan peneliti, disimpulkan bahwa manajemen krisis yang dilakukan Walikota Ambon Richard Louhenapessy sebagai kepala pemerintah Kota Ambon dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus sengketa tanah berada pada konflik pertanahan yang mengakibatkan dampak yang luas dan sudah diselesaikan sampai ke pengadilan, tetapi masih timbul konflik antara kedua belah pihak, sehingga diadakan mediasi yang difasilitasi oleh Walikota Ambon dengan hasil keputusan pengembalian batas wilayah. Akan tetapi, proses pengembalian itu terjeda akibat Walikota Ambon terjerat kasus korupsi.
2. Walikota Ambon Richard Louhenapessy merupakan pemangku kepentingan sekunder atau pendukung sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut.
3. Manajemen krisis yang digunakan pada tahap krisis sedang berlangsung, pada kasus sengketa tanah ini menggunakan dua aspek, yaitu aspek mekanisme, di mana Walikota Ambon melakukan penyelidikan dan pengidentifikasian terhadap gejala yang ditimbulkan, serta untuk aspek dinamika, yaitu Walikota Ambon melakukan koordinasi kepada pihak-pihak lain guna mengurangi dampak yang berkepanjangan.

5.2 Saran

Saran yang peneliti sampaikan terkait masalah sengketa tanah yang terjadi antara TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri, kiranya pemerintah juga menerapkan aspek yang ketiga yaitu, aspek menjaga hubungan dengan pihak publik eksternal maupun internal, dimana melakukan pemantauan pemberitaan yang beredar, serta menyampaikan setiap progress laporan terkini terkait kasus sengketa yang sedang berlangsung.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan menganalisis dengan topik yang sama mengenai manajemen krisis yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon terkait sengketa tanah TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri, diharapkan untuk dapat meneliti pada pemangku kepentingan lainnya, yaitu Komnas HAM maupun tim sebelas yang juga turut serta dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut, dan melihat kelanjutan kasus tersebut seperti apa. Dikarenakan pada penelitian ini, peneliti berfokus pada satu pemangku kepentingan yaitu Walikota Ambon sebagai kepala pemerintah kota.